

PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Nova Dwi Qomariyahti

06novadwi@gmail.com

Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of Local Own Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure toward the economy growth. This research applies secondary data in the form of budget realization report from each Local Government which has been collected from the Audit Board of Indonesia East Java Province and the economic growth data which has been collected from the Statistics Indonesia of East Java Province. The samples are 132 Districts / Cities in East Java and the data analysis has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The result of the regressions analysis shows that Local Own Source Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund give positive influence to the economic growth. Meanwhile the capital expenditure does not give any influence to the economy growth. The amount of R^2 is 36.4% which can be explained by independent variables i.e. Local Own Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure whereas the remaining is 63.6% which can be explained by other variables which are not included in the research models.

Keywords: Local Own Source Revenue, Fiscal balance, capital expenditure, economy growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Timur dan data pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 132 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil Analisis regresi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan R^2 sebesar 36,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan sumber pendanaan atau ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sumber pendanaan ini Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan hak, kebebasan, dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam hal penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah Namun pemerintah pusat tidak serta merta melepaskan pemerintah daerah begitu saja. Akan tetapi, pemerintah pusat masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah, disamping hal itu pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa PAD untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Tetapi, kewenangan tersebut memiliki timbal balik berupa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat pula, dan juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 4) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 4) Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, Permanasari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal. Dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting artinya, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak-pajak yang mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Disamping itu APBD merupakan alat kontrol pengawas terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.

Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara. Dalam penyusunan APBD, kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, lalu disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dari Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya operasional pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Pada dasarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membeli aset tetap yang merupakan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk memenuhi fasilitas publik.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan, perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.

Dengan diserahkan beberapa kewenangan ke pemerintah daerah diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pandangan ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah memahami benar karakteristik daerahnya maka alokasi anggaran pembangunan lebih terarah, artinya dalam pengalokasian anggaran publik pemerintah daerah harus menangkap apa yang menjadi ekspektasi publik. Bila hal ini tidak dipahami dengan baik maka alokasi anggaran publik dalam bentuk belanja publik tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian yang ada yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) menemukan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin meningkat laju pertumbuhannya. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah, dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Dalam penelitian yang ada yang dilakukan oleh Permanasari (2013) menemukan bahwa ada hubungan positif antara dana alokasi umum dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Dalam penelitian yang ada yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) menemukan bahwa ada hubungan positif antara dana alokasi khusus dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

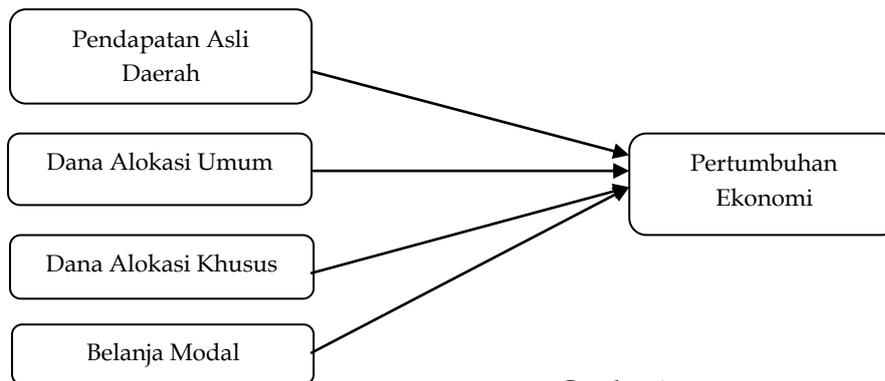
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam penelitian yang ada yang dilakukan oleh Adi (2006) menemukan bahwa ada hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Meningkatnya prosentase belanja modal pemda dibandingkan sebelum desentralisasi memberikan indikasi adanya kesungguhan pemda untuk meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Model Penelitian

Dari hasil perumusan hipotesis dapat ditarik model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan obyek yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/kota yang disajikan dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jawa Timur tahun 2012 hingga 2015 dan Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2015 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah: (1) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur; (2) Kabupaten dan Kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap 4 tahun pada tahun 2012 sampai 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menggunakan laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dan dikelola sedemikian rupa untuk keperluan penelitian. Data sekunder adalah data yang informasinya diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan. Pada penelitian ini data sekunder di dapat dalam bentuk dokumentasi, yaitu data yang bersumber atau diterbitkan oleh BPK RI Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel independenya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah diukur dengan jumlah seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) maka dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah direpresentasikan dengan rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kotasebesar 90%.

Pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Dalam penelitian ini dana alokasi umum diukur dengan celah fiskal dan alokasi dasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) maka dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum direpresentasikan dengan rasio realisasi Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus diukur dengan 2 tahapan yaitu (1) penentuan daerah tertentu yang berhak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), (2) penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) maka dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus direpresentasikan dengan rasio realisasi Dana Alokasi Khusus terhadap total pendapatan daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Realisasi Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Belanja Modal (BPN)

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) maka dalam penelitian ini Belanja Modal direpresentasikan dengan rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}$$

Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu melalui angka capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan. Adanya data pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun. yang diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Model analisis ini dipilih karena untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{PEK} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{BPN}$$

Keterangan :

- PEK = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi Variabel Bebas
- PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
BPN	= Belanja Modal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di bagian Timur Pulau Jawa. Letak Geografis Provinsi Jawa Timur adalah 111°0' - 114°4' Bujur Timur dan 7°12' - 8°48' Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi Terbesar di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 39.107.095 jiwa. Banyaknya Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk Terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Secara administratif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.722 Desa.

Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah Kepulauan termasuk Madura. Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang. Pulau Madura merupakan Pulau Terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, dimana provinsi Jawa Timur memiliki 38 Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel didapat 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang Laporan Realisasi Anggaran terindikasi bermasalah berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 3 (Tiga) Kabupaten/Kota yang Laporan Realisasi Anggaran bermasalah adalah Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep dan Kota Madiun. Selanjutnya dari kriteria tersebut 35 Kabupaten/Kota yang dapat diamati berjumlah 27 Kabupaten dan 8 Kota yang sudah memenuhi kriteria.

Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini selama Tahun 2012-2015 adalah 140 sampel (35 Kabupaten/Kota x 4 tahun pengamatan). Namun setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui terdapat 8 data *outliers* pada penelitian ini. Data *outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data, data *outliers* yang memiliki karakteristik unik dan harus dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini. Sehingga data yang digunakan dalam sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Prosedur Penentuan Sampel

No.	Keterangan	2012	2013	2014	2015	Jumlah Sampel
1	Laporan Realisasi APBD Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	38	38	38	38	152
2	Kab/Kota yang belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD	(3)	(3)	(3)	(3)	(12)
3	Data <i>Outliers</i>	(2)	(2)	(2)	(2)	(8)
4	Total sampel yang dapat digunakan	33	33	33	33	132

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Prov. Jatim

Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perhitungan data dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16, Hasil analisis deskriptif variabel disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	132	.0510	.6097	.1399	.0938
DAU	132	.1733	.6548	.5366	.0878
DAK	132	.0005	.1343	.0437	.0204
BPN	132	.0794	.3535	.1850	.0441
PEK	132	.0377	.0758	.0588	.0072
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan pada pengolahan diatas terlihat bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,0510. Kabupaten/Kota yang memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah dengan nilai minimum adalah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012. Dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 63.287.007.576 dibagi total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.239.939.240.883 sehingga didapatkan rasio realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi sebesar 0,0510. Sedangkan pada tahun 2015 Kota Surabaya memperoleh rasio pendapatan asli daerah sebesar 0,6097. Dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.035.649.478.397 yang merupakan kota dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Provinsi Jawa Timur, tingginya Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari rasio pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2015 sebesar 0,1399 sedangkan nilai standar deviasi pendapatan asli daerah sebesar 0,0938.

Pada variabel Dana Alokasi umum terlihat bahwa rasio Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 0,1733 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio dana alokasi umum dengan nilai minimum adalah Kota Surabaya pada tahun 2015. Dengan realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.147.385.486.000 dibagi dengan total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 6.619.031.160.936 sehingga didapatkan rasio realisasi dana alokasi umum sebesar 0,1733. Sedangkan pada tahun 2012 Kota Batu memiliki rasio realisasi Dana Alokasi Umum sebesar 0,6548 dari total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 495.994.989.183 ini adalah rasio realisasi Dana Alokasi Umum yang paling tinggi selama periode tahun 2012-2015 dan setiap tahunnya Kota Batu selalu menjadi daerah dengan rasio Dana Alokasi

Umum tertinggi. Tingginya rasio Dana Alokasi Umum ini disebabkan karena luas wilayah Kota Batu yang sempit dan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maka jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kota Batu menjadi yang paling tinggi diantara kabupaten atau kota yang ada di provinsi di Jawa timur. Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari rasio Dana Alokasi Umum yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2015 sebesar 0,5366 sedangkan rasio standar deviasi dari dana alokasi umum sebesar 0,0878.

Pada variabel Dana Alokasi Khusus terlihat bahwa rasio Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar 0,0005 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio Dana Alokasi Khusus dengan nilai minimum adalah Kota Kediri pada tahun 2012. Nilai rasio realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Kediri adalah 0,0005 yang didapatkan dari realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 424.100.000 dibagi total realisasi pendapatan daerah Kota Kediri sebesar Rp. 872.279.882.803. Sedangkan Pada tahun 2013 Kota Pasuruan memiliki nilai rasio realisasi dana alokasi khusus sebesar 0,1343 dari realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 77.421.870.000 dibagi total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 576.598.456.068. Tingginya rasio realisasi Dana Alokasi Khusus ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan daerahnya Kota Pasuruan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat terutama dalam membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari dana alokasi khusus yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2015 sebesar 0,0437 sedangkan nilai standar deviasi dari rasio dana alokasi khusus sebesar 0,0204.

Pada variabel Belanja Modal terlihat bahwa rasio Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 0,0794 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio realisasi Belanja Modal dengan nilai minimum adalah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012. Nilai rasio realisasi Belanja Modal Kabupaten Ngawi adalah sebesar 0,0794 dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 122.174.469.760 dibagi total realisasi belanja daerah Kabupaten Ngawi sebesar Rp. 1.167.648.869.561. Sedangkan Pada tahun 2015 Kota Batu memiliki nilai rasio belanja modal sebesar 0,3535 dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 281.882.302.047 dibagi total realisasi belanja daerah Kota Batu sebesar Rp. 797.294.924.728 Tingginya rasio belanja modal Kota Batu ini termasuk salah satunya dikarenakan karena luas wilayah Kota Batu yang sempit sehingga banyak dilakukan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu salah satunya berupa penyediaan sarana infrastruktur. Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari belanja modal yang dikeluarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2015 sebesar 0,1850 sedangkan nilai standar deviasi dari belanja modal sebesar 0,0441.

Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai minimum adalah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012. Yang berarti Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro meningkat sebesar 3,77% dari nilai Produk Domestik Regional Bruto tahun lalu sebesar Rp. 36.751.000.000 menjadi Rp. 38.136.000.000 pada tahun 2012. Sedangkan Pada tahun 2013 Kota Surabaya memiliki nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0758 atau sebesar 7,58% Yang berarti pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya meningkat sebesar 7,58% dari nilai Produk Domestik Regional Bruto tahun lalu sebesar Rp. 265.892.000.000,00 menjadi Rp. 286.051.000.000,00 pada tahun 2013. Naiknya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, dikarenakan mendapatkan kenaikan PAD, dimana Kota Surabaya memiliki tiga sektor penunjang perekonomian yakni perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan/transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar menyumbang pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Adapun nilai rata-rata (*mean*) dari Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2012-2015 sebesar 0,0588 sedangkan nilai standar deviasi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0072.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Uji Normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov, yaitu sebagai berikut: jika nilai probabilitas dari Uji Normalitas dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov $> 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal, dan nilai probabilitas $< 0,05$, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Dengan hasil besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,751 > 0,050$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai D-W adalah 0,457 dengan ketentuan angka D-W dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika angka D-W tersebut berada diantara -2 sampai +2 sedangkan angka D-W yang diperoleh pada tabel di atas adalah 1,457 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut.

Uji Multikoloniaritas

Berdasarkan hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan BPN mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% (0,10). Hal ini berarti bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel diatas tidak terdapat persoalan multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan adanya titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara linier. Hasil perhitungan statistik pada Analisis Regresi Linier Berganda ditunjukkan pada berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.020	.010		-1.948	.054
	PAD	.112	.013	1.445	8.352	.000
	DAU	.104	.014	1.250	7.411	.000
	DAK	.065	.030	.181	2.177	.031
	BPN	.025	.013	.153	1.954	.053

a. Dependent Variable: PEK

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PEK = -0,020 + 0,112 PAD + 0,104 DAU + 0,065 DAK + 0,025 BPN$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna: (1) Nilai konstanta sebesar -0,020, artinya apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka diprediksi untuk nilai perusahaan yang dihasilkan sebesar -0,020. (2) Besarnya nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,112 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel PAD sebesar 1% akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,112 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. (3) Besarnya nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,104 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel DAU sebesar 1% akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,104 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. (4) Besarnya nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,065 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel DAK sebesar 1% akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,065 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. (5) Besarnya nilai koefisien regresi Belanja Modal sebesar 0,025 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel BPN sebesar 1% akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,025 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari pengujian kelayakan model yang tampak pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	4	.001	18.133	.000 ^a
	Residual	.004	127	.000		
	Total	.007	131			

a. Predictors: (Constant), BPN, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: PEK

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa angka F hitung sebesar 18.133 dengan sig 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$, ini berarti tingkat signifikansi $f \leq 0,05$ yang artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal modal yang layak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari uji koefisien determinasi berganda yang nampak pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.343	.005

a. Predictors: (Constant), BPN, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: PEK

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Hasil pengujian pada Tabel 5 diketahui *R square* (R^2) sebesar 0,364 atau 36,4% yang menunjukkan kontribusi dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah relatif kecil. Sedangkan sisanya 63,6% dikontribusi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,603 atau 60,3% yang mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesisi diketahui bahwa:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian hasil uji hipotesis yang pertama dengan menggunakan Uji t berhasil membuktikan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktifitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya, dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah, dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hasil uji hipotesis yang kedua dengan menggunakan Uji t berhasil membuktikan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang kecil, Dana Alokasi Umum sangat berperan penting bagi pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permasari (2013) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hasil uji hipotesis yang ketiga dengan menggunakan Uji t berhasil membuktikan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, dan diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus.

Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, dimana aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat didalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permasari (2013) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena realisasi transfer dana ke daerah dinilai belum sepenuhnya optimal disebabkan karena lemahnya penyusunan perencanaan. Karena perencanaan yang baik akan menentukan arah penggunaan anggaran sehingga kualitas belanja daerah tersebut tidak terlalu baik karena alokasi belanja belum dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat karena memerlukan waktu untuk mendapatkan manfaat dari alokasi belanja Modal tersebut. Belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD untuk belanja modal berupa pembangunan infrastruktur daerah, sehingga tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja modal daerah. Meningkatnya prosentase belanja modal pemerintah daerah dibandingkan sebelum desentralisasi memberikan indikasi adanya kesungguhan pemda untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2013) dan Setiyawati dan Hamzah (2007) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2012-2015 maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan R^2 sebesar 36,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur diharapkan untuk dapat meningkatkan penggalan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerahnya. Hal ini dikarenakan jika pendapatan asli daerah melimpah maka pemerintah daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja modal yang didalamnya mencakup infrastruktur dan sarana prasarana. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur saja, sehingga hasil penelitiannya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 23-26 Agustus: 1-22.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur 2011 – 2015. Oktober. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 *Dana Perimbangan*. 10 November 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4021. Jakarta.
-
- Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Permanasari, W.,A. 2013. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*: 1-18.
- Setiyawati, A. A. Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(2): 211-228.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
-
- Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.